

DILEMA PRAKTIS GLOBALISME NEOLIBERAL

*M. Kholid Syeirazi**

Abstract

The world currently witnessing both globalization and globalism. Globalization manifests in economic, political and cultural domain, provides prescriptive judgement on what to do and not to do. Praxis of neoliberal globalism is problematic because what readily available is prescription rather than philosophical referent. The world has increasingly more integrated, and nation state has been obsolete not because of the truth, but rather the prescriptive nature of the ideology.

Kata-kata kunci: *neoliberalisme; ideologi; globalisme*

Pengantar

Tulisan ini akan menguji sah beberapa asumsi ideologis yang termuat dalam klaim-klaim globalisme neoliberal. Beberapa klaim itu diantaranya: globalisasi akan mendorong penyejahteraan global yang mengintegrasikan manusia dalam rimbun desa buana (*global village*), globalisasi akan meneguhkan superioritas ekonomi dari politik Negara dan institusi politik lainnya akan semakin usang dan tidak relevan, serta globalisasi akan menciptakan *worldview* universal yang menjadi pedoman nilai manusia sejangat.

Mengikuti Steger,¹ kerangka analisis tulisan ini akan membedakan istilah globalisasi dan globalisme. Globalisasi adalah

* *M. Kholid Syeirazi* adalah mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, mantan Ketua PMII Gadjah Mada

¹ Manfred B. Steger, *Globalism : The New Market Ideology* (Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002), hal. 13

proses material dan sosial yang didefinisikan oleh berbagai kalangan secara berbeda-beda dan sering saling bertentangan. Sementara globalisme adalah paket retorik yang berwujud ideologi pasar neoliberal yang memberikan norma, nilai, dan makna tertentu terhadap proses globalisasi. Sebagai ideologi, globalisme tidak hanya memberikan deskripsi, tetapi juga preskripsi.² Globalisme memberikan preskripsi-preskripsi normatif terhadap proses globalisasi. Asumsi-asumsi yang meramalkan menjelangnya senjakala *nation-state* dan kedaulatan—dalam analisis tulisan ini—karena itu akan dipandang lebih sebagai pernyataan ideologis ketimbang analitis. Sebab, apa yang dilukiskan orang seperti Ohmae dalam *The Borderless World*³ dan *The End of The Nation-State*⁴ maupun O'Brien dalam *Global Financial Integration; The End of Geography*⁵, tidak murni merupakan gambaran tentang—meminjam istilah Giddens⁶—*what went on*, tetapi juga *what should go on*. Mereka tidak hanya melukiskan apa yang tengah terjadi, tetapi lebih dari itu memberikan skema tentang apa yang seharusnya terjadi.

Sebagaimana watak ideologi lainnya, globalisme memiliki tiga ciri khas seperti dikemukakan Ricoeur, yakni distorsi, legitimasi, dan integrasi⁷. Globalisme memberikan gambaran atas realitas sosial yang telah mengalami proses konstruksi, distorsi, dan simplifikasi, sehingga semesta realitas yang distrukturkan olehnya pada level sosial dapat berkembang menjadi sebetuk kesadaran palsu. Melalui sistem legitimasi, globalisme memiliki mekanisme pengabsahan atas berbagai kerangka pemikiran dan acuan tindakan yang diajukannya.

² James Petras dan Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked; Imperialism in 21 st Century* (Canada and London: Fernwood Publishing & Zed Books, 2001), hal. 11

³ Kenichi Ohmae, *The Borderless World; Power and Strategy in the Interlinked Economy* (London: Harper Business, 1990)

⁴ Kenichi Ohmae, *The End of the Nation-State; The Rise of Regional Economies* (Hammersmith, London: HarperCollins Publisher, 1996)

⁵ Richard O'Brien, *Global Financial Integration: The End of Geography* (London: Chatham House/Pinter, 1992)

⁶ Anthony Giddens, *The Nation-State and Violence; Volume Two of Contemporary Critique of Historical Materialism* (Cambridge: Polity Press, 1985), hal. 45

⁷ Lihat paparan karakter ideologi Paul Ricour dalam *Lectures on Ideology and Utopia*, ed. George H. Taylor (New York: Columbia University Press, 1986)

Akhirnya, globalisme memiliki fungsi integratif, yakni menyediakan serangkaian simbol, norma, dan citra yang menghimpun dan merekatkan identitas individu ke dalam lingkungan kolektif.

Untuk menghantarkan analisis lebih jauh tentang tendensi-tendensi ideologis globalisme sebagai proses ideasional, akan dinarasikan terlebih dahulu peta diskursus globalisasi sebagai proses material.⁸ Untuk memperoleh gambaran utuh tentang konstelasi wacana ini, akan diskemakan pemetaan wilayah isu yang menjadi konsen para ahli. Wilayah isu ini meliputi—meminjam klasifikasi Giddens⁹—teori-teori radikal dan skeptis globalisasi. Teori radikal mendedahkan keniscayaan globalisasi, sementara teori skeptis meragukan kemungkinannya. Beberapa tokoh skeptis ini bahkan menyebut globalisasi sebagai *globaloney* (bualan global).

Globalisasi sebagai *Globaloney*

Globalisasi oleh kelompok ini dianggap sebagai konsep yang tidak jelas, kabur dan dilebih-lebihkan. Mereka menganggap bahwa apa yang digulirkan sebagai diskursus globalisasi tak lebih sebagai isapan jempol. Istilah *globaloney* diciptakan oleh Bob Fitch untuk menggolongkan argumen-argumen para teoritikus globalisasi yang sifatnya tendensius dan tautologis.¹⁰ Argumen yang diajukan oleh kelompok ini terpilah dalam tiga golongan besar. Golongan pertama menampik kedayagunaan globalisasi sebagai konsep analitis yang tepat dan memadai. Golongan kedua menunjuk pada watak terbatas proses-proses globalisasi dan meragukan akan lahirnya dunia yang terintegrasi seperti diyakini para pendukung globalisasi. Dalam pandangan golongan ini, istilah globalisasi juga tidak pas dalam melukiskan apa yang sesungguhnya tengah terjadi saat ini.

⁸ Skema dan struktur pemetaan uraian ini banyak merujuk karya Manfred B. Steger, *Globalism: The New Market Ideology* (Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002)

⁹ Anthony Giddens, *Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives* (London: Profile Books, 1999), hal. 7-8

¹⁰ James Petras Petras dan Henry Veltmeyer, *op.cit.*, hal. 44

¹¹ Craig Calhoun "Nationalism and Ethnicity" *Annual Review of Sociology*, 19 (1993), hal. 215-16

Sedangkan golongan ketiga menampik kebaruan fenomena globalisasi seraya mendukung kecenderungan moderat proses-prosesnya.

Golongan Pertama

Golongan ini menolak penggunaan istilah globalisasi sebagai konsep analitis dan memberikan kritik tajam atas kekaburan istilah yang lazim dipakai dalam wacana akademis. Istilah lain yang setaraf derajat kekaburannya namun sering disebut-sebut adalah nasionalisme. Craig Calhoun, misalnya, menyatakan bahwa nasionalisme dan istilah-istilah turunannya telah terbukti sangat sulit didefinisikan, sebab nasionalisme adalah gejala beragam, sehingga suatu definisi akan mengabsahkan satu klaim dan menon-absahkan klaim lainnya.¹¹ Evaluasi yang sama kritisnya diberikan oleh Susan Strange yang menandakan bahwa globalisasi adalah contoh utama kata-kata kosong yang dipakai dalam wacana akademis untuk menunjuk segala sesuatu dari internet hingga hamburger. Begitu juga Linda Weiss yang berkeberatan atas istilah yang menurutnya merupakan gagasan besar namun bertumpu pada fondasi yang rapuh.¹²

Golongan Kedua

Golongan ini skeptis terhadap proses globalisasi dunia. Mereka menyatakan bahwa globalisasi sejak dari perwatakannya bersifat terbatas. Mereka mementahkan apa yang dikemukakan oleh para teoritikus ekstrim globalisasi bahwa dunia akan terlipat dan menyusut oleh peleburan dunia dalam proses pengintegrasian sejagat. Pandangan ini nampak jelas dalam karya Hirst dan Thompson. Dalam *Globalization in Question*, Hirst dan Thompson menyatakan bahwa globalisasi adalah mitos. Ekonomi dunia saat ini tidak pernah benar-benar bersifat global, sebab aksis perdagangan, investasi, dan arus

¹² Manfred B. Steger, *op.cit.*, hal. 20

¹³ Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance* (Cambridge: Polity Press, 1999), hal. 2

finansial tetap lebih banyak terkonsentrasi pada Tritunggal Eropa, Jepang dan Amerika Utara.¹³ Evaluasi yang lebih tajam diberikan oleh Petras dan Veltmeyer. Kedua eksponen ini menampilkan penggunaan istilah globalisasi untuk menunjuk proses pegintegrasian ekonomi dunia saat ini. Sebab, globalisasi mengandaikan adanya saling ketergantungan antar negara, watak berbagi dalam sistem ekonominya, kebersamaan dalam sejumlah kepentingannya, dan distribusi maslahat dalam sistem pertukarannya. Namun, yang terjadi saat ini tidaklah demikian. Apa yang berlangsung dalam tata ekonomi dunia saat ini adalah eksploitasi dan dominasi negara-negara imperialis dan perusahaan-perusahaan serta perbankan multinasional terhadap negara-negara miskin dan kelas-kelas buruh. Oleh karena itu, menurut keduanya, istilah yang paling pas dipakai untuk melukiskan realitas tata ekonomi dunia saat ini bukanlah globalisasi, melainkan imperialisme.¹⁴

Golongan Ketiga

Golongan ini menepis anggapan kebaruan gejala globalisasi. Globalisasi sering dianggap proses baru yang tidak memiliki preseden dalam sejarah. Perkembangan baru ini sering secara umum dianggap muncul setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1960-an.¹⁵ Robert Gilpin dalam studi terbarunya mengakui adanya kecenderungan pengglobalan dunia saat ini, namun ia menegaskan bahwa banyak aspek penting dari globalisasi bukanlah perkembangan baru. Mengutip Krugmann, Gilpin mencatat bahwa ekonomi dunia pada tahun 1990-an terlihat tidak lebih terintegrasi dibandingkan masa sebelum pecahnya Perang Dunia I. Gilpin juga mencatat bahwa globalisasi tenaga kerja jauh lebih besar sebelum PD I dan migrasi internasional justru mengalami penurunan cukup tajam setelah tahun

¹⁴ James Petras dan Henry Veltmeyer, *op. cit.*, hal. 29-30

¹⁵ Robert J. Holton, *Globalization and Nation-State* (London: Macmillan Press Ltd., 1998), hal. 21; Paul Hirst & Grahame Thompson, *op. cit.*, hal. 19

¹⁶ Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century* (Princeton, NJ.: Princeton University Press, 2000), hal. 294-95

1918. Karenanya, Gilpin mengingatkan pembacanya dalam mengikuti argumen-argumen mereka yang ia sebut sebagai *hyper-globalizers*.¹⁶

Kesan serupa juga nampak dalam pandangan Hirst dan Thompson. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa tata ekonomi yang sangat mendunia saat ini bukanlah sesuatu yang tanpa preseden, melainkan suatu konjungtur dari tata ekonomi internasional yang telah mulai ada sejak ekonomi berbasis teknologi industri modern mulai merambah ke seluruh dunia sejak tahun 1860-an. Dalam beberapa hal, menurut Hirst dan Thompson, ekonomi internasional saat ini *lebih tidak* terbuka dan terintegrasi dibandingkan dengan ekonomi yang ada pada tahun 1870 hingga 1914.¹⁷ Ekonomi internasional, dilihat dari berbagai segi, lebih terbuka pada masa sebelum tahun 1914 dari pada masa sesudahnya, termasuk masa akhir tahun 1970-an dan seterusnya. Arus perdagangan dan arus modal internasional, baik antara sesama negara-negara industri atau negara industri dengan koloni-koloninya sebelum PD I, jauh lebih menonjol dibandingkan PDB sekarang. Jika pada semua ini ditambahkan migrasi internasional, maka jelaslah bahwa pada awal abad ini ekonomi internasional sudah sangat berkembang, terbuka, dan terintegrasi. Karena itu, ekonomi internasional zaman sekarang bukanlah sesuatu yang tanpa preseden.¹⁸

Globalisasi sebagai Proses Ekonomi

Studi globalisasi ekonomi biasanya berjangkar di tengah narasi sejarah yang melacak kemunculan gradual ekonomi baru pasca perang sampai ke konferensi Bretton Woods tahun 1944. Di bawah kepemimpinan AS dan Inggris, kekuatan-kekuatan utama ekonomi Barat memutuskan untuk membalik kebijakan proteksionis pada masa perang (1914-1939) menuju perluasan perdagangan internasional. Capaian utama sistem Bretton Woods meliputi liberalisasi terbatas

¹⁷ Paul Hirst & Grahame Thompson, *op.cit.*, hal. 2

¹⁸ *ibid.*, hal. 32

perdagangan dan pembentukan aturan-aturan yang mengikat aktivitas-aktivitas ekonomi internasional. Konferensi Bretton Woods juga sepakat menciptakan sistem pertukaran mata uang stabil dengan menetapkan nilai mata uang masing-masing negara berdasar nilai emas tetap dalam dollar AS. Dalam batas-batas yang dibentangkan ini, setiap negara bebas mengontrol agenda-agenda ekonomi mereka sendiri, termasuk implementasi ekstensif kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Konferensi Bretton Woods juga menciptakan fondasi institusional dibentuknya tiga organisasi ekonomi internasional baru. IMF dibentuk untuk mengatur sistem moneter internasional. World Bank pada awalnya dirancang untuk memberi pinjaman pembangunan kembali negara-negara Eropa pasca perang. Mulai tahun 1950-an, tujuannya diperluas untuk mendanai proyek-proyek industrialisasi di berbagai negara Dunia Ketiga. Pada tahun 1947, GATT menjadi organisasi perdagangan global yang diberi tanggung jawab membuat dan menyokong perjanjian-perjanjian dagang multilateral. Pada tahun 1995, WTO dibentuk sebagai pengganti GATT. Sebagaimana akan ditunjukkan pada uraian berikutnya, baik skema filosofis maupun kebijakan neoliberal dalam badan-badan baru internasional ini menjadi pangkal tolak sengitnya kontroversi ideologis seputar efek globalisasi ekonomi pada akhir tahun 1990-an.

Semasa beroperasinya selama tiga dekade, sistem Bretton Woods menaruh saham besar terhadap terbentuknya apa yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai "masa emas kapitalisme terkendali" (*golden age of controlled capitalism*). Menurut skema sistem ini, mekanisme kontrol negara atas pergerakan kapital internasional memungkinkan terpenuhinya padat kerja (*full employment*) dan meluasnya kesejahteraan. Meningkatnya upah dan layanan sosial memungkinkan dilestarikannya kompromi tentatif klas di negara-negara kaya di belahan bumi Utara.

Kebanyakan sarjana yang menekankan aspek ekonomi globalisasi melacak percepatan kecenderungan integrasi dunia dalam ekonomi global pada saat tumbangannya sistem Bretton Woods di awal tahun 1970-an. Dalam merespon perubahan-perubahan besar dalam ekonomi dunia yang meruntuhkan daya saing industri berbasis AS, Presiden Richard Nixon pada tahun 1971 memutuskan untuk melepas

sistem nilai tukar tetap berdasar emas. Perpaduan antara ide-ide politik baru dan perkembangan-perkembangan ekonomi—membubungnya inflasi, merosotnya pertumbuhan ekonomi, membengkaknya pengangguran, defisit sektor publik, dua kali krisis minyak dalam satu dekade—mendorong kemenangan spektakuler partai-partai konservatif dalam pemilu di AS dan Inggris. Partai-partai ini mendesak gerak neoliberal menuju ekspansi pasar internasional, dinamika yang didukung oleh deregulasi sistem finansial domestik, pelepasan bertahap kontrol kapital, dan meningkat tajamnya transaksi-transaksi finansial global.

Selama tahun 1980 dan 1990-an, upaya Inggris-Amerika membangun pasar global tunggal lebih jauh disokong oleh perjanjian menyeluruh liberalisasi perdagangan yang mendongkrak arus sumber-sumber daya ekonomi yang menerjang batas-batas nasional. Terbitnya paradigma neoliberal mendapatkan legitimasinya lebih jauh oleh tumbanginya sistem ekonomi komando di Eropa Timur pada tahun 1989-1991. Membuyarkan konsensus prinsip-prinsip ekonomi Keynesian pasca perang, teori-teori pasar bebas yang dipelopori oleh Friedrich Hayek dan Milton Friedman tampil sebagai ortodoksi ekonomi baru yang menganjurkan pemupusan negara kesejahteraan, pemangkasan peran-peran pemerintah, dan deregulasi ekonomi. Penekanan kuat pada langkah-langkah monetaris untuk menekan laju inflasi mendorong penghapusan skema padat kerja ekonomi Keynesian dalam rangka membangun pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Terlebih lagi, pergeseran dramatis dari ekonomi yang dikuasai negara ke ekonomi yang dikendalikan pasar diiringi oleh inovasi teknologis yang menurunkan biaya transportasi dan komunikasi. Nilai perdagangan dunia meningkat tajam dari 57 juta dollar AS pada tahun 1947 ke level menakjubkan, yakni 6 triliun dollar AS pada tahun 1990.¹⁹

Terdapat paling tidak dua aspek penting globalisasi ekonomi, yakni perubahan watak proses produksi dan internasionalisasi transaksi finansial. Sebagian analisis menganggap adalah munculnya

¹⁹ Manfred B. Steger, *op.cit.*, hal. 26-27

sistem finansial transnasional yang merupakan ciri utama ekonomi dunia dewasa ini. Proses globalisasi finansial mengalami percepatan secara dramatis pada akhir tahun 1980-an ketika pasar modal dan sekuritas di Eropa dan AS dideregulasikan. Liberalisasi perdagangan finansial ini memungkinkan pesatnya mobilitas di antara segmen-segmen industri finansial, dengan restriksi yang lebih sedikit dan tatapan peluang investasi dalam skala global. Lebih jauh, kemajuan dalam pemrosesan data dan teknologi informasi menyumbang pada ledakan pertumbuhan nilai-nilai finansial yang diperdagangkan. Ditopang oleh teknologi komunikasi, para pemburu laba dan spekulan global menanggung hasil spektakuler dengan cara mengambil keuntungan dari lemahnya sistem regulasi perbankan dan keuangan di pasar-pasar negara berkembang. Pada akhir tahun 1990-an, jumlah yang berkisar hampir dua triliun dollar AS diperdagangkan di pasar mata uang global.

Sementara penciptaan pasar finansial mewakili aspek krusial globalisasi ekonomi, perkembangan penting lainnya pada tiga dekade terakhir meliputi perubahan watak dalam produksi global. Perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) mengonsolidasikan operasi globalnya dalam pasar kerja dunia yang semakin dideregulasikan. Ketersediaan buruh murah, sumber-sumber daya, dan syarat-syarat produksi menguntungkan yang ada di dunia ketiga mempertinggi mobilitas dan keuntungan TNCs. Meliputi 70 persen perdagangan dunia, badan-badan usaha raksasa ini memperluas jangkauan globalnya ketika investasi asing mereka meningkat kurang lebih 15 persen setahun selama periode 1990-an. Kemampuan perusahaan-perusahaan ini untuk menyebar proses *manufacturing* di berbagai lokasi bumi yang berbeda-beda sering dicatat sebagai tonggak globalisasi ekonomi. Mata rantai komoditas global seperti ini memungkinkan perusahaan-perusahaan besar seperti *Nike* dan *General Motors* untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk-produk mereka dalam skala global. Nike, misalnya, mensubkontrakkan 100 persen produksi barangnya kepada 75.000 pekerja di Cina, Korsel, Malaysia, dan Thailand.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hal. 28

Sistem produksi transnasional memperbesar daya kapitalisme global untuk meningkatkan kemampuan TNCs dalam menghempang pengaruh politis unit-unit perdagangan berbasis nasional dan serikat-serikat pekerja dalam proses *bargaining* perubahan kolektif.

Globalisasi sebagai Proses Politik

Sebagaimana ditunjukkan kasus TNCs, perspektif ekonomi dalam globalisasi hampir tidak bisa didiskusikan lepas dari analisis proses-proses politik. Perdebatan terbesar dalam globalisasi politik adalah berkenaan dengan nasib negara-bangsa modern. Beberapa pertanyaan awal yang perlu diajukan adalah; pertama, sebab-sebab politik apakah yang mendorong arus massif kapital, uang, dan teknologi melintasi batas-batas teritorial? Kedua, apakah arus ini merupakan tantangan serius terhadap keberadaan *nation-state*? Ketiga, bagaimanakah dampak munculnya organisasi-organisasi *intergovernmental* terhadap konsep kedaulatan negara dan bagaimana prospek *global governance*? Dalam merumuskan jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas, beberapa sarjana terbagi dalam empat kelompok pandangan.

Pertama, mereka yang menganggap bahwa globalisasi merupakan proses yang secara intrinsik berkaitan dengan ekspansi pasar. Secara lebih khusus, kemajuan pesat dalam teknologi komputer dan sistem komunikasi seperti jaringan lintas dunia (*worldwide web*; *www*) dipandang sebagai kekuatan utama yang bertanggung jawab atas terciptanya pasar global tunggal. Menurut pandangan ini, politik nyaris tanpa daya di hadapan truk besar teknoekonomi yang tak terhalau yang akan melabrak upaya pemerintah mengintroduksi kembali kebijakan dan aturan-aturan yang restriktif. Ekonomi dianggap memiliki logika dalam (*inner logic*) yang terpisah dari dan superior terhadap politik. Menurut pandangan ini, kombinasi kepentingan diri ekonomi (*economic self-interest*) dan inovasi teknologis adalah yang bertanggung jawab menghantarkan fase baru dalam sejarah dunia ketika peran pemerintah tereduksi di hadapan

kekuatan pasar bebas. Negara, menurut eksponen pandangan ini, akan direduksi menjadi "superkonduktor kapitalisme global".²¹

Barangkali, yang paling mewakili kelompok ini adalah Kenichi Ohmae. Perancang strategi bisnis Jepang ini menyatakan bahwa *nation-state* menjadi tak lagi relevan dalam perkembangan global. Ohmae memproyeksikan keniscayaan munculnya "dunia tanpa tapal batas" (*the borderless world*) berkat daya dorong kapitalisme. Dari perspektif ekonomi, Ohmae menandakan bahwa *nation-state* telah kehilangan perannya sebagai unit partisipasi yang berarti dalam perekonomian global.²² Sebagaimana pembagian wilayah tak lagi relevan bagi masyarakat manusia, negara tak lagi mampu mendeterminasi arah kehidupan sosial dalam batas-batas wilayah mereka. Negara, oleh pendisiplinan pasar global, semakin kerdil kemampuannya dalam mengontrol nilai tukar dan memproteksi mata uangnya. Dalam jangka panjang, proses-proses globalisasi politik akan mendorong hancurnya teritori sebagai kerangka yang memiliki makna untuk memahami perubahan-perubahan sosial dan politik. Tertib politik masa depan, menurut Ohmae, akan menjadi suatu ekonomi regional yang saling terhubung (*interlinked*) dengan hampir semua jaringan global yang bekerja menurut prinsip pasar bebas.²³

Kelompok sarjana kedua menampik anggapan bahwa perubahan-perubahan ekonomi skala besar semata terjadi dalam masyarakat sebagai sesuatu yang alamiah seperti, misalnya, gempa bumi atau angin topan. Melainkan, mereka menyoroiti peran sentral politik—khususnya mobilisasi kekuasaan politik—dalam menebarkan jaring-jaring diseminasi globalisasi. Pandangan ini berpijak dari filosofi yang menekankan watak keagenan aktif manusia. Jika bentuk globalisasi ekonomi ditentukan oleh politik, maka preferensi politik yang berbeda akan menghasilkan kondisi sosial yang berbeda. Menurut eksponen kelompok ini, akar-akar ekspansi massif ekonomi global tidak terletak baik pada "hukum alamiah pasar" maupun

²¹ Lowell Bryan dan Diana Farrel, *Market Unbound: Unleashing Global Capitalism* (New York: Wiley, 1996), hal. 187

²² Kenichi Ohmae, *The End of the Nation-State; op. cit.*, hal. 42

²³ Kenichi Ohmae, *The Borderless World; op. cit.*, hal. xi-xii

perkembangan teknologi komputer, melainkan pada keputusan politik yang dibuat pemerintah untuk melepas restriksi internasional terhadap kapital. Begitu keputusan politik diimplementasikan pada tahun 1980-an, inovasi-inovasi teknologi hadir secara otomatis. Negara dan teritori, menurut pandangan ini, tetap sesuatu yang penting, bahkan dalam konteks global.²⁴

Kelompok sarjana ketiga memandang globalisasi sebagai dipicu oleh perpaduan faktor-faktor politik dan teknologi. Globalisasi adalah hasil dari kemajuan teknologis dan kebijakan pemerintah dalam mereduksi limitasi-limitasi dalam sistem pertukaran internasional. "Globalization", kata salah seorang penganut paham ini, *is the child of both technology and policy*.²⁵ Sementara menurut Jhon Gray, globalisasi adalah proses panjang yang dikendalikan oleh teknologi yang bentuk kontemporernya ditentukan secara politik oleh negara-negara yang paling kuat di dunia. Menurut Gray, adalah tujuan mendasar prakarsa neoliberal Anglo-Amerika untuk merekayasa terbentuknya pasar bebas global. Pemiakan teknologi baru yang cepat dan tak dapat dielakkan merambah ke seluruh penjuru bumi yang membuat modernisasi masyarakat dunia yang dibimbing oleh teknologi menjadi sebuah "takdir sejarah". Namun, Gray menegaskan bahwa tak ada negara yang memiliki kekuatan hegemonik yang dapat mewujudkan pasar bebas sejagat. Gray juga memperkirakan bahwa ekonomi dunia akan runtuh tatkala keseimbangannya tak lagi dapat dipertahankan. Karena itu, Gray meramalkan 'akhir suram' upaya-upaya politik dewasa ini untuk membangun pasar global tunggal. Perang perdagangan, menurut Gray, akan membuat kerja sama internasional lebih sulit. Ketika *laissez faire* global runtuh, anarki internasional yang meluas akan merupakan prospek manusia ke depan.²⁶

Kelompok sarjana keempat menghampiri globalisasi politik terutama dari perspektif *global governance*. Representasi kelompok ini menganalisis berbagai peran respon-respon nasional dan multilateral

²⁴ Manfred B Steger, *op. cit.*, hal. 30

²⁵ Joseph S. Nye Jr., *The Paradox of American Power; Why the World's Only Super Power Can't Go it Alone* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hal. 91

²⁶ Dikutip dari Manfred B. Steger, *op. cit.*, hal. 31

terhadap fragmentasi sistem ekonomi-politik dan arus transnasional yang menerjang melintasi batas-batas nasional. Ilmuwan politik seperti Held dan Falk dalam tulisan-tulisan mereka mengartikulasikan perlunya *global governance* sebagai konsekuensi logis proses globalisasi. Keduanya menggambarkan globalisasi sebagai telah mengikis pemerintahan nasional, karena itu juga mereduksi relevansi *nation-state*. Menurut Held, baik sistem lama kedaulatan *nation-state* Westphalia maupun sistem global pasca perang yang berpusat pada PBB tidak menawarkan solusi yang memuaskan terhadap setumpuk tantangan globalisasi politik. Alih-alih, Held menawarkan munculnya bentuk penadbiran demokratis multilapis (*a multilayered form of democratic governance*) yang berpijak pada cita-cita kosmopolitan Barat, pengaturan hukum internasional, dan jaringan luas yang menghubungkan antara berbagai institusi pemerintahan dan non-pemerintahan. Held menyebut adanya kecenderungan inheren dalam proses globalisasi yang akan memperkuat lembaga-lembaga supra nasional dan munculnya masyarakat sipil internasional. Dia meramalkan bahwa hak-hak demokratis pada akhirnya akan dilepaskan dari kaitan sempitnya dengan unit-unit teritorial tertentu. Held memvisionerkan munculnya demokrasi kosmopolitan yang mencakup elemen-elemen politik sebagai berikut: parlemen global yang terkait dengan wilayah, negara, dan lokalitas; piagam hak dan kewajiban-kewajiban baru yang mengikat berbagai wilayah kekuatan ekonomi, sosial, dan politik; pemisahan formal antara ekonomi dan politik, sistem hukum global yang saling berkaitan (*interlinked*) dengan mekanisme penegakannya dari level lokal hingga global.²⁷

Senafas dengan visi ini, Falk menandakan bahwa globalisasi politik akan mendorong kemunculan kekuatan sosial demokratis transnasional yang berjangkar dalam *civil society*. Falk membedakan "globalisasi dari bawah" (*globalization-from below*) yang dipimpin rakyat demokratis dari "globalisasi dari atas" (*globalization-from above*) yang dikendalikan oleh pasar dan perusahaan-perusahaan besar. Visi

²⁷ David Held, 'Democracy and the New International Order'. Dalam Daniele Archibugi dan David Held [eds.], *Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order* (Cambridge: Polity Press, 1995); hh. 96-120

yang diusung Falk adalah memperkuat kekuatan-kekuatan demokratis melalui agensi gerakan sosial transnasional dan asosiasi kewargaan yang bisa memfasilitasi tumbuhnya *global civil society*. Gerakan globalisasi dari bawah diharapkan dapat mendorong cita keadilan sosial, masyarakat tanpa kekerasan, dan keseimbangan ekologis.²⁸ Globalisasi dari atas yang dikendalikan ide-ide neoliberal yang mencakup doktrin liberalisasi, privatisasi, minimisasi regulasi ekonomi, penggungtingan program kesejahteraan, pemangkasan belanja publik, pengetatan disiplin fiskal, dorongan arus kapital yang lebih bebas, kontrol ketat atas organisasi buruh, pemotongan pajak, dan repatriasi mata uang tanpa batas telah melahirkan efek-efek detrimental yang berupa hancurnya keseimbangan relasi trilateral antara negara, rakyat, dan kapital. Globalisasi dari atas telah melahirkan wajah globalisasi yang buas (*predatory globalization*). Karena itu, diperlukan gerakan tanding (*countermoves*) terhadap globalisasi neoliberal melalui gerakan globalisasi dari bawah.²⁹

Sejumlah kritikus penghampiran kedua tokoh ini memustahilkan ide bahwa globalisasi politik akan memicu ke arah perkembangan demokrasi kosmopolitan.

Globalisasi sebagai Proses Kultural

Telaah tentang globalisasi kultural meliputi wilayah isu; akankah globalisasi mendorong keseragaman budaya atau malah justru membiakkan keragaman dan diversitas? Apakah globalisasi akan membuat orang menjadi semakin sama atau tambah berbeda? Kebanyakan pengkaji mendahului jawaban mereka atas pertanyaan ini dengan analisis umum mengenai relasi globalisasi dan perubahan kebudayaan kontemporer. Tomlinson, misalnya, mendefinisikan globalisasi kultural sebagai "memadatnya jaringan kompleks interkoneksi kultural dan kesalingtergantungan yang menjadi ciri

²⁸ Richard Falk, *On Humane Governance: Toward a New Global Politics* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1995), hal. 86-7

²⁹ Richard Falk, *Predatory Globalization: A Critique* (Cambridge: Polity Press, 1999), hal. 2-3

kehidupan sosial modern".³⁰ Menurut Tomlinson, arus kultural global dipandu oleh perusahaan-perusahaan media internasional yang menggunakan teknologi komunikasi baru untuk membentuk masyarakat dan identitas. Sebagaimana citra dan gagasan dapat dengan mudah dan cepat tersebar dari satu tempat ke tempat lain, teknologi ini akan berdampak pada cara orang mengalami peristiwa keseharian mereka. Budaya tak lagi terikat pada lokalitas yang mapan seperti kota atau negara, melainkan menyebar dalam jaringan-jaringan global. Interkonektivitas ini didesakkan oleh globalisasi kultural yang menabrak nilai-nilai dan identitas parokial, sebab ia akan menumbangkan pertautan yang menghubungkan antara kebudayaan dan kerapatan lokasi (*fixity of location*).

Sejumlah sarjana mengargumentasikan bahwa proses globalisasi akan melapangkan jalan menuju munculnya kebudayaan global yang dipimpin oleh sistem nilai Anglo-Amerika. Beberapa orang memandang globalisasi sebagai proyek Amerikanisasi, yakni terjadinya proses imperialisme kebudayaan Amerika. Ohmae menyebutnya sebagai *California-ization of taste*,³¹ sementara sosiolog Amerika, George Ritzer, mengistilahkannya dengan *McDonaldization of Society*.³² Ritzer, melalui istilah itu, memotret fenomena ketika tradisi siap saji restoran Amerika merambah semakin besar sektor masyarakat Amerika dan seluruh dunia. Tradisi ini sekilas nampak rasional sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara cepat dan efisien. Namun, dalam jangka panjang, McDonaldisasi menurut Ritzer akan menggiring pada hancurnya keragaman kultural dan proses dehumanisasi hubungan-hubungan sosial.

Sarjana lain menegaskan bahwa globalisasi tidaklah berarti homogenisasi, tetapi munculnya satu bentuk baru keragaman kultural. Roland Robertson misalnya, membuktikan bahwa arus kultural global seringkali justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya bukanlah homogenisasi

³⁰ Dikutip dari Manfred B. Steger, *op. cit.*, hal. 34

³¹ Kenichi Ohmae, *The End of the Nation-State; op. cit.*, hal. 15

³² George Ritzer, *The McDonaldization of Society* (Thousands Oaks, CA: Pine Forge Press 1993)

melainkan glokalisasi, yakni kompleks interaksi global-lokal yang dicirikan oleh saling pinjam kebudayaan. Interaksi ini akan berujung pada perpaduan kompleks antara dorongan-dorongan ke arah homogenisasi dan heterogenisasi. Momentum ini sering juga disebut sebagai hibridisasi atau kreolisasi yang tercermin dalam musik, film, *fashion*, bahasa, dan ekspresi-ekspresi simbolik lainnya. Bukannya terbenam ke dalam pusaran konsumerisme Barat, keragaman dan partikularitas lokal berevolusi ke dalam konstelasi dan wacana kebudayaan baru.³³

Perdebatan tentang globalisasi kultural pada urutannya akan berujung kepada kontroversi panjang seputar apakah abad kita sekarang harus dipahami dalam kerangka perluasan modernitas ataukah ia merupakan kondisi baru postmodern yang dicirikan oleh tanggalnya asumsi-asumsi mapan tentang identitas dan pengetahuan? Inilah pertanyaan besar yang melahirkan banyak madzhab dalam ilmu sosial.

Ideologi Globalisme: Doktrin-doktrin Neoliberal

Sikap dasar tulisan ini akan mengikuti argumen bahwa proses globalisasi tidaklah terjadi semata berkat revolusi teknologi dan ekspansi pasar, melainkan lebih terutama karena faktor politik. Yakni, peran aktif negara-negara yang menjadi aktor utama dalam sistem internasional dalam mendesak kebijakan-kebijakan maupun konstruksi ideologisnya untuk mendorong terjadinya proses itu.³⁴ Siapakah aktor utama itu? Bagaimana wujud kebijakannya? Bagaimana pula konstruk ideologisnya?

Proses liberalisasi pasar yang terjadi secara massif sejak tahun 1970-an pada dasarnya dikendalikan oleh doktrin neoliberal yang sejak dekade 1940-an telah didesak-desakkan kemunculannya oleh

³³ Lihat Manfred B. Steger, *op. cit.*, hal. 36-7; Robert J. Holton, *op. cit.*, hal.187-95

³⁴ Lihat Manfred B. Steger, *op. cit.*, hal. 9; Mohtar Mas'od, *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2002), hal. 22

pionir aliran ini, yakni Friedrich Von Hayek dan muridnya Milton Friedman dari Universitas Chicago. Inti ajaran neoliberalisme mencakup: keutamaan pembangunan ekonomi; pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan; pasar bebas tanpa restriksi; pilihan individual; pemangkasan regulasi pemerintah; dan pembelaan atas model pembangunan sosial evolusioner yang berjangkar dari pengalaman Barat yang dapat diterapkan ke seluruh dunia.³⁵

Ajaran neoliberalisme ini sebenarnya merupakan revitalisasi atas doktrin-doktrin para pemikir liberal klasik seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) dan Herbert Spencer (1820-1903). Para tokoh neoliberal yang kemudian terkenal dengan julukan intelektual "Kanan Baru" (*New Right*) menghidupkan kembali ajaran-ajaran lama, namun dalam bingkai dan kemasan baru. Yang mereka lakukan adalah—meminjam istilah Steger—"*pouring old philosophical wine into new ideological bottles*", yakni menuang anggur filsafat lama dalam botol ideologis baru. Keberhasilan Hayek dan Friedman dalam mengembangkan gagasan-gagasannya telah menyulut gelombang pengingkaran massal terhadap paradigma ekonomi Keynesian. Oleh keberhasilannya, Hayek dan Friedman berturut-turut memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1974 dan 1976.

Debut neoliberalisme dalam praksis kebijakan publik melejit sejak tahun 1979 ketika Margareth Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris dan menjalankan revolusi neoliberal di Inggris. Gerakan yang serupa terjadi di Amerika Serikat ketika Ronald Reagan menjadi presiden AS dan mendesakkan revolusi neoliberal di sana. Revolusi neoliberalisme di dua negara besar ini melahirkan julukan Reagan-Thatcherisme yang kemudian didukung oleh Kanselir Jerman Helmut Kohl. Dengan dukungan dari ketiga negara yang berpengaruh besar ini, neoliberalisme menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai lembaga internasional, terutama yang bobot pengaruh keanggotaannya ditentukan oleh besarnya sumbangan pendanaannya, seperti IMF dan World Bank.³⁶

³⁵ Manfred B. Steger, *loc. cit.*

³⁶ Mohtar Mas'ood, *op. cit.*, hal. 6

Sebagaimana telah dilansir, penyangga utama ajaran neoliberal adalah Anglo-Amerika. Dua negara ini telah mengambil prakarsa penting dalam menguniversalkan doktrin-doktrin neoliberalisme ke seluruh dunia. Atas dasar asumsi bahwa proses globalisasi terjadi tidak semata berkat perkembangan teknologi maupun dorongan intrinsik pasar melainkan lebih karena faktor politik, maka dorongan politik apakah yang menyebabkan kedua negara ini mengambil kebijakan hiper-liberalisasi dan mencampakkan paradigma ekonomi Keyneysian? Sekali lagi, dengan merujuk Mas'ood,³⁷ akan diketahui bahwa liberalisasi pasar finansial yang digalakkan besar-besaran sejak tahun 1970-an dapat berlangsung sebab ia sesuai dengan kepentingan AS sebagai pemain utama dalam sistem kapitalis dunia. Sejarahahnya adalah demikian. Bahwa pada akhir 1960-an, AS mengalami peningkatan yang luar biasa dalam defisit anggaran belanja maupun neraca pembayarannya. Hal ini berdampak pada merosotnya status hegemonik AS dalam banyak bidang hubungan internasional. Untuk membangun kembali posisi hegemoniknya, AS pada masa Presiden Nixon melakukan berbagai tindakan. Salah satunya adalah memperluas pasar finansial dengan cara penghapusan kendali atas transaksi devisa.

Mengingat bahwa sejak lama pasar finansial AS jauh lebih menggiurkan para pedagang uang dibanding bursa pasar di Eropa maupun Jepang yang penuh regulasi, maka bisa dimengerti kalau kebijakan baru AS ini mengundang banyak investor asing masuk ke bursa pasar mereka. Dengan latar seperti ini, akan mudah disimpulkan bahwa undangan AS kepada para investor asing sebenarnya dalam rangka membiayai defisit anggaran belanja dan neraca pembayarannya. Karena sistem Bretton Woods tidak memungkinkan pelanggaran kendali atas transaksi devisa, maka bisa dimengerti kalau AS pada tahun 1971 segera mencampakkan komitmen Bretton Woods yang ia buat sendiri seperempat abad sebelumnya. Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) produk Konferensi Bretton Woods yang berlaku sejak 1944 terdesak mundur pada tahun 1971, dan semakin surut ketika banyak negara maju

³⁷ *Ibid.*, hal. 19

secara gencar mulai mengadopsi sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) pada tahun 1973.

Salah satu serangan intelektual Kanan Baru terhadap fondasi manajemen makro-ekonomi Keyneysian adalah bahwa sistem ini dianggap telah mendistorsi mekanisme bekerjanya pasar secara alamiah. Sistem yang mengundang banyak campur tangan negara dalam ekonomi dituduh telah menghasilkan membubungnya angka inflasi di seluruh dunia pada tahun 1970-an. Bagi para intelektual Kanan Baru, adalah inflasi, bukan pengangguran, yang merupakan "*the most urgent and alarming contemporary economic problem*".³⁸ Di samping adanya faktor-faktor objektif ekonomi yakni, membubungnya inflasi, merosotnya pertumbuhan ekonomi, membengkaknya pengangguran, defisit sektor publik dan terjadinya krisis minyak—kemenangan ide-ide neoliberal terutama dimungkinkan berkat adanya dukungan politik negara Anglo-Amerika. Dari perspektif ini, ide-ide neoliberal yang lebih mengagungkan pasar daripada negara mengidap semacam paradoks, problem yang telah lama ditengarai Karl Polanyi. Di satu sisi, mereka sangat mempercayai keunggulan pasar dibanding negara, namun di sisi lain, untuk menghidupkan kembali ide dan implementasi gagasan *laissez faire*, mereka sangat membutuhkan peranan aktif negara. Menurut Polanyi "bahkan orang yang sangat bersemangat menghendaki negara dibebaskan dari semua tugas yang tak perlu, dan mereka yang seluruh filsafatnya menuntut restriksi aktivitas negara, pun mau tak mau harus mengandalkan negara yang sama dengan segenap kekuasaan, organ, dan instrumen baru yang diperlukan untuk mewujudkan pasar bebas. Paradoks ini memuncak oleh fakta lain. Bahwa sementara ekonomi pasar bebas adalah produk dari tindakan sengaja Negara, restriksi dalam *laissez-faire* yang terjadi kemudian bermula dengan cara spontan. *Laissez-faire* direncanakan; padahal perencanaan bukanlah (*laissez-faire*)".³⁹

³⁸ Phyllis Deane, *The State and the Economic System: An Introduction to the History of Political Economy* (Oxford and New York: Oxford University Press, 1989), hal. 18

³⁹ Karl Polanyi, *The Great Transformation; The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 2001) 2nd paperback edition, hal. 147

Meskipun secara konsisten para eksponen neoliberalisme menggempur manajemen *demand* Keynesian, agenda-agenda Kanan Baru justru menyokong peningkatan peran negara dalam perekonomian. Jauh dari tindakan menyingkiri perekonomian, negara justru semakin terlibat aktif dalam ekonomi makro, seperti dalam kebijakan moneter dan suku bunga sebagai respon terhadap fluktuasi nilai tukar dan untuk menarik lebih banyak investasi. Negara-negara tempat ideologi Kanan Baru dominan, seperti Amerika di bawah Ronald Reagan dan Inggris di bawah Margaret Thatcher, belanja publik dan anggaran untuk persenjataan dan pertahanan justru mengalami peningkatan yang sangat dramatis. Sehingga, para pendukung pasar bebas sebenarnya adalah juga pendukung pengeluaran publik besar-besaran yang—seperti segala macam belanja publik lainnya—dianggap sia-sia dan menyalahgunakan kekuasaan negara dalam tradisi liberal abad ke-19. Oleh karena itu, Sugiono menyebut bahwa keteguhan ide Kanan Baru untuk mereduksi peran negara sesungguhnya lebih bersifat retorik ketimbang realistis.⁴⁰ Ada dua gejala yang bisa dijadikan bukti betapa besarnya peranan negara dalam mendorong proses liberalisasi ini.⁴¹

Pertama, pembentukan pasar mata uang dollar di Eropa. Pada tahun 1960-an, Inggris dan AS mendukung munculnya pasar *Eurodollar* di London. Pasar ini memberikan lingkungan *offshore* yang bebas dari ikatan pemerintah nasional bagi pertukaran aset finansial yang didenominasi dalam mata uang asing, terutama dollar. Di masa ketika sebagian besar negara di dunia masih menerapkan pengendalian ketat terhadap arus perpindahan kapital, penciptaan pasar finansial *Eurodollar* merupakan pasar bebas bagi para bankir swasta. Pasar ini jelas bertentangan dengan ciri pokok ekonomi-politik dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II, yaitu sistem hubungan finansial yang terkendali ketat. Dukungan pemerintah Inggris terhadap pasar *Eurodollar* sangat penting karena ia memberikan basis fisik bagi pasar itu. Salah satu alasan Inggris mengizinkan beroperasinya pasar bebas dari regulasi adalah keinginan otoritas

⁴⁰ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, terj. Nur Cholis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 147

⁴¹ Lihat Mohtar Mas'ood, *op. cit.*, hal. 21-3

perbankan negara itu untuk mempertahankan peran London sebagai pusat finansial internasional walaupun ekonomi negara itu tidak lagi mendominasi dunia.

Kecenderungan mengapa Inggris membiarkan pasar itu menggunakan mata uang asing dan bukannya sterling adalah karena Inggris mungkin ingin tetap mengendalikan penggunaan sterling dalam transaksi internasional demi mempertahankan neraca pembayarannya yang melemah pada masa 1950 dan 1960-an. Dengan mengizinkan para bankir beroperasi dalam mata uang asing, terutama dollar, internasionalisme London bisa dipertahankan tanpa mengganggu neraca pembayaran Inggris. Dukungan AS juga penting, sebab bank-bank dan perusahaan-perusahaan AS masih dominan dalam pasar finansial itu. Walaupun cukup punya kekuasaan, pemerintah AS tidak mencegah berbagai bank dan perusahaan itu untuk beroperasi dalam pasar *Eurodollar*. Mengapa? Ada dua alasan. *Pertama*, sebagai kompensasi dari ketatnya pengendalian dalam negeri di tahun 1960-an dan kendala akibat undang-undang perbankan yang diciptakan tahun 1930-an, bank-bank dan perusahaan multinasional (PMN) AS menuntut kebebasan untuk beroperasi di luar negeri. *Kedua*, para pembuat kebijakan AS menyadari bahwa pasar *Eurodollar* yang bebas dari regulasi bisa meningkatkan daya tarik dollar bagi investor swasta dan bank-bank sentral luar negeri pada saat AS mengalami masalah neraca pembayaran. Dengan kata lain, dukungan terhadap *Eurodollar* merupakan pengakuan atas kenyataan bahwa tatanan internasional yang lebih liberal bisa membantu pembiayaan defisit AS yang semakin meningkat dan mempertahankan posisi sentralnya dalam sektor finansial di dunia.

Gejala *kedua* adalah demam liberalisasi yang melanda Eropa dan AS yang semakin mencampakkan sistem Bretton Woods. AS dan Inggris seolah saling berlomba dalam menerapkan kebijakan liberalisasi. AS menghapuskan kendali atas perpindahan kapital pada tahun 1974, sedangkan Inggris tahun 1979. AS menderegulasi *New York Stock Exchange* tahun 1975 sementara Inggris melakukan liberalisasi dan deregulasi *London Stock Exchange* pada tahun 1986. Tujuan Inggris adalah meningkatkan daya tarik London sebagai pusat finansial internasional sehingga tidak kalah saing dari New York.

Tahun 1980-an, tindakan AS dan Inggris ini diikuti oleh liberalisasi yang dilakukan oleh semua negara industri maju. Akibatnya, sistem Bretton Woods tergeletak kehabisan tenaga karena ditinggalkan oleh negara-negara yang telah sekian lama menjadi pendukung setianya. Negara-negara itu beralasan bahwa, kalau tidak terlibat aktif dalam *trend* liberalisasi, mereka khawatir banyak kapital yang *footloose* akan henggang lari ke New York atau London yang telah menjadi pusat finansial yang sepenuhnya liberal.

Dua gejala ini telah menjadi cukup bukti bahwa betapa faktor politik, yakni keterlibatan aktif dua negara kunci Anglo-Amerika, menjadi determinan yang mempengaruhi perubahan-perubahan besar dalam tata ekonomi-politik dunia. Faktor politik ini semakin jelas terlihat ketika negara-negara besar memanipulasi lembaga-lembaga internasional produk Konferensi Bretton Woods dan memberi mereka fungsi dan peranan baru. Yang diubah bukan hanya susunan personalia lembaga-lembaga itu, melainkan juga ideologi, misi, dan mandatnya. Misalnya, IMF yang semula hanya berfungsi sebagai *clearing house* bagi bank-bank sentral nasional dan penjaga stabilitas moneter negara-negara anggotanya, sejak saat itu diberi mandat baru yang lebih luas dengan sarana yang lebih efektif sehingga bisa bertindak sebagai polisi, akuntan, selain sebagai bankir untuk negara-negara anggotanya.

Paparan di atas semakin meneguhkan inti argumen yang ingin ditandakan tulisan ini, yakni bahwa upaya untuk menyimak doktrin-doktrin neoliberal tidak bisa diletakkan semata dari perspektif analitis, tetapi lebih harus dalam kerangka ideologis. Inti ideologi neoliberalisme dapat dirangkum dalam tiga kata kunci: liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi.

Pada tingkat operasional, skema ideologis ini dijabarkan dalam seperangkat paket kebijakan ekonomi yang harus diterapkan khususnya oleh negara-negara berkembang. Butir-butir kebijakan neoliberal ini dicetuskan sejak tahun 1990-an dan sering disebut sebagai "*Washington Consensus*". Ia terdiri dari sepuluh poin program yang pada mulanya dirancang dan disusun oleh Jhon Williamson, bekas penasihat IMF tahun 1970-an. Sepuluh program ini menjadi paket kebijakan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara Dunia

Ketiga dalam program reformasi ekonominya. Program-program tersebut adalah:⁴²

1. Jaminan pendisiplinan fiskal dan pengekangan defisit anggaran.
2. Pengurangan belanja-belanja publik, khususnya militer dan administrasi publik.
3. Reformasi pajak, untuk menciptakan sistem dengan basis luas dan pelaksanaan efektif.
4. Liberalisasi finansial, dengan tingkat suku bunga yang ditentukan pasar.
5. Nilai tukar bersaing, untuk menyokong pertumbuhan berbasis ekspor.
6. Liberalisasi perdagangan beserta penghapusan ijin impor dan penurunan tarif.
7. Mendorong investasi asing.
8. Privatisasi badan-badan usaha milik negara demi efektivitas manajemen dan perbaikan performa.
9. Deregulasi ekonomi.
10. Perlindungan terhadap hak-hak milik.

Dengan landasan normatif ini, dunia didorong menuju proses pengintegrasian global. Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian *nation-state* berada ditubir kehancuran? Apakah posisi dan perannya akan terhempas oleh arus globalisasi kapital?

Evaluasi Kritis Praksis Globalisasi

Untuk mengevaluasi keseluruhan debat argumen tentang dilema praksis globalisasi, skema evaluasi akan dipilah melalui dua spektrum: etis dan analitis. Evaluasi analitis berkaitan dengan realitas faktual sebagaimana terjadi dalam kenyataan (*das sein*). Unit analisisnya adalah data empiris. Sementara evaluasi etis berkaitan dengan persoalan moral: "*is globalization a good or a bad thing?*" Unit analisisnya adalah tinjauan normatif (*das sollen*). Dengan model

⁴² Manfred B. Steger, *op. cit.*, hal. 63-4

evaluasi demikian, diharapkan muncul perspektif wacana yang lebih berimbang. Evaluasi analitis akan dibagi dalam dua bidang. Yang pertama dihimpun dalam rubrik yang saling berkaitan, yaitu ekonomi-politik dan kedua dalam bidang kultural.

Hal pertama bertalian dengan persoalan bagaimana globalisasi secara ekonomi dan politik merombak struktur wewenang *nation-state*. Benarkah ia membetot *nation-state* sebagai unit vital dalam politik global? Jika mengacu pada analisis empiris, dapat dibuktikan bahwa proses ekonomi global tidak berbanding lurus dengan tercampakkannya *nation-state*. Ada paling tidak empat indikasi untuk meneguhkan hal ini. *Pertama*, korporasi multinasional dan transnasional, perangkat utama penggerak ekonomi global, tidak pernah benar-benar melintasi batas nasional. Aset-aset utama mereka, sebagaimana dinyatakan Hirst dan Thompson, tetap berkedudukan pada basis lokal dan nasional.⁴³

Kedua, negara-negara kaya yang tergabung dalam G-7/ OECD tidak sepenuhnya melepas negara demi liberalisasi. Dalam prakteknya, mereka pun menjalankan politik proteksionisme. Salah satu butir kesepakatan "Marrakesh Accord" yang ditandatangani pada 15 April 1994 sebagai hasil final "Putaran Uruguay" adalah klausul tentang TRIPs (*trade-related intellectual property rights*). Klausul ini pada hakekatnya adalah bentuk proteksionisme dan bukan liberalisasi yang dirancang negara-negara kaya. Dengan klausul ini, negara-negara kaya bermaksud mengamankan paten teknologi, disain industri, dan *copyright* agar tidak bocor secara cuma-cuma ke negara-negara miskin. Teknologi yang menjadi penopang utama penguasaan pasar internasional diamankan agar tetap menjadi kemewahan dan hak milik negara-negara kuat. Dengan melakukan proteksionisme teknologi, negara-negara miskin akan dibiarkan selamanya tertinggal terus dibelakang mereka. Sebab, tanpa penguasaan teknologi, negara-negara miskin mustahil dapat bersaing dengan negara-negara kuat di pasar internasional. Negara-negara kaya yang berpaham perdagangan bebas, dengan kata lain, hendak berdagang bebas untuk

⁴³ Paul Hirst & Grahame Thompson, *op. cit.*, hal. 2

dirinya sendiri, namun mengenakan serangkaian kuota, restriksi, dan permainan tarif kepada negara-negara lain, khususnya Dunia Ketiga.

Ketiga, aktor-aktor ekonomi global tidak pernah benar-benar ingin meruntuhkan *nation-state*. Sebab, seperti dilansir Holton⁴⁴, mereka memerlukan *supporting structure* untuk menjamin stabilitas dan regulasi sehingga kapital bisa beroperasi secara aman. Secara empiris, *nation-state* bukan saja tidak benar-benar hendak diruntuhkan oleh aktor-aktor kapital global, melainkan kehadirannya justru sering diteguhkan untuk meratakan jalan bagi beroperasinya kapital internasional. Dalam bahasa Smith dan Naim, globalisasi bukan hanya hendak menghancurkan negara, tetapi sekaligus mengukuhkannya.⁴⁵ *Nation-state* terutama diperlukan rezim kapital untuk menertibkan dan menjinakkan klas buruh. Kelompok ini harus diawasi sehingga dipastikan tidak akan menjadi gerakan revolusioner yang bisa membahayakan kelangsungan operasi modal.

Terakhir, penggunaan kekuatan militer yang merupakan instrumen penting negara tidak praktis tersisihkan dalam konstelasi geo-politik dan ekonomi. Militer, seperti dalam kasus invasi AS ke Iraq baru-baru ini, tetap menjadi alat konstruksi dan resolusi penting dalam konstelasi ekonomi-politik internasional. Penguatan militer menunjukkan penguatan negara dan bukan keruntuhannya. Belanja militer tergolong dalam klasifikasi belanja publik. Jika belanja publik oleh klaim neoliberalis dianggap sebagai pemborosan, maka pemborosan serupa sebenarnya dilakukan oleh negara-negara besar pendukung utama neoliberalisme. Di dua negara tempat ideologi Kanan Baru dominan, seperti Amerika di bawah Ronald Reagan dan Inggris di bawah Margaret Thatcher, belanja publik untuk kebutuhan persenjataan dan pertahanan justru mengalami peningkatan yang sangat dramatis. Sebuah data yang disusun pada tahun 1980-an—saat ketika ideologi Kanan Baru sedang naik daun dan neoliberalisme sedang dalam tahap formatif—belanja militer dunia pada tahun 1979 yang mencapai 370, 607 juta dollar AS (dengan nilai tukar 1978), 29-

⁴⁴ Robert J. Holton, *op. cit.*, hal. 108

⁴⁵ Gordon Smith & Moises Naim, *Altered States: Globalization, Sovereignty, and Governance* (Ottawa, Canada: International Development Research Centre, 2000), hal. 9

1 persen di antaranya adalah belanja militer Amerika. Jumlah anggaran militer dunia ini jauh lebih besar dibanding jumlah bantuan luar negeri resmi (*Official Development Assistance*) yang diberikan oleh 17 negara yang tergabung dalam OECD kepada negara-negara berkembang pada tahun 1979 yang hanya berjumlah 22, 267 juta dollar AS.⁴⁶

Pada bidang kultural, globalisasi juga tidak berarti tanggalnya identitas lokal-nasional menuju satu identitas global, melainkan lahirnya dialektika identitas global, nasional, lokal dan individual dalam apa yang oleh Roland Robertson disebut dengan glocalisasi.⁴⁷ Globalisasi tidak meratakan jalan bagi keseragaman cita rasa budaya, melainkan mendorong proses kreolisasi dan hibridisasi. Kebudayaan lokal tidak tenggelam dalam arus budaya global, melainkan terjadi interpenetrasi yang partikular ke dalam yang universal dan yang universal ke dalam yang partikular. Dalam ungkapan Appadurai, "*globalization is not the story of cultural homogenization*",⁴⁸ dan karena itu "*globalization does not necessarily or even frequently imply homogenization or Americanization*".⁴⁹ Sebuah contoh dapat diangkat dari hasil studi yang dilakukan Jonathan Friedman pada tiga masyarakat suku: Kongo, suku Ainu di Jepang dan suku asli Hawaii.⁵⁰ Dari studinya, Friedman menunjukkan adanya berbagai macam respon budaya lokal terhadap globalisasi sebagai strategi identifikasi diri, definisi diri, dan proteksi diri komunitas lokal. Studi Friedman membuka perspektif bahwa respon lokalitas terhadap kebudayaan

⁴⁶ Lihat M. Dawam Rahadjo, "Pembangunan dan Kekerasan Struktural: Agenda Riset Perdamaian", dalam *Prisma*, No. 3 (Maret 1981), hal. 8

⁴⁷ Lihat Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture* (London: Sage); dan Roland Robertson, "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity" dalam M. Featherstone, S. Lash dan R. Robertson [eds.], *Global Modernities* (London: Sage), hh. 25-44; Sementara rangkuman teorinya dapat dibaca pada Robert J. Holton, *op. cit.*, hh. 187-96

⁴⁸ Arjun Appadurai, *Modernity at Large; Cultural Dimensions of Globalization* (Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2000), cet. ke-4, hal. 11

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 17

⁵⁰ Lihat Jonathan Friedman, "Being the World: Globalization and Localization" dalam M. Featherstone [ed.], *Global Culture* (London: Sage, 1990), hh. 311-28 ; bdk. uraian Lambang Trijono "Globalisasi Modernitas dan Krisis Negara-Bangsa: Tantangan Integrasi Nasional dalam Konteks Global", dalam *Analisis CSIS*, XXV, No. 2 (Maret-April 1996) hal. 142-143

global berbeda-beda. Respon-respon unik ini meneguhkan asumsi bahwa lokalitas memiliki strateginya sendiri untuk menghadapi kultur globalisasi. Lokalitas tidak sepenuhnya luruh dan afirmatif terhadap penetrasi kebudayaan global, melainkan melakukan dialog, resistensi, adaptasi, dan interpenetrasi.

Spektrum analisis kedua adalah pada tataran etis-normatif. Pada tingkat etis-normatif, globalisasi dalam pertarungan besar. Jika globalisasi meleset dari bayangan ideal *global village*, ketika orang di seluruh dunia tidak hidup sejahtera dalam rimbun desa buana, tetapi justru dalam situasi *global pillage* (penjarahan global) di mana segelintir orang merampok kekayaan alam dan membiarkan sebagian besar lainnya terpuruk dalam kemiskinan, maka globalisasi secara moral tengah dalam gugatan serius. Globalisasi tidak menciptakan keamanan dan perdamaian jika ia membiarkan kesenjangan sosial umat manusia tetap tak terjembatani. Bagaimana mungkin perdamaian dunia dan keadilan sosial akan tercapai jika kesenjangan pola hidup dan penghasilan segelintir orang berbeda secara diametral dengan sebagian besar lainnya. Bagaimana mungkin perdamaian abadi akan terwujud jika, misalnya, sebanyak satu milyar manusia hidup dalam kemiskinan, dan berpenghasilan kurang dari 1 dollar setiap hari? Bagaimana mungkin harmoni hidup dapat tercapai jika setiap hari 40.000 bayi di dunia mati sebab ditikam oleh penyakit dan kekurangan gizi? Bagaimana mungkin kerukunan sosial akan tercipta jika jurang gaya hidup antar kawasan begitu curam? Jika biaya yang dihabiskan untuk belanja kosmetik wanita Amerika sebesar 8 milyar AS setiap tahun, dan biaya yang diperlukan bagi pendidikan dasar keluarga miskin di semua negara Dunia Ketiga hanya 6 milyar setahun, maka bagaimana mungkin harapan tentang harkat dan martabat sejajar bangsa-bangsa bisa ditegakkan? Jika untuk belanja es krim saja penduduk Eropa setiap tahunnya menghabiskan 11 milyar dollar, sementara untuk pengadaan air bersih dan sanitasi di seluruh dunia hanya membutuhkan dana 9 milyar dollar AS, maka impian apa yang bisa dimunculkan tentang harkat hidup, harmoni sosial, dan perdamaian dunia?⁵¹

⁵¹ Data-data ini dikemukakan oleh Dr. Oscar Arias, mantan Presiden Costa Rica dan peraih Nobel perdamaian tahun 1987 dalam ceramahnya yang berjudul *The Moral Challenge of Globalization* di York University, Toronto. Laporrannya dapat dibaca dalam Kompas, 31 Agustus 2001, hal. 36

Temuan antropolog Marshall Sahlins mempertajam wajah bopeng modernitas yang tampil dalam proyek pembangunan dan globalisasi. Sahlins menyingkap paradoks utama pembangunan modern: masyarakat-masyarakat pemburu dan pengumpul makanan yang paling primitif di bumi, seperti suku Aborigin di Australia dan manusia semak di Afrika menikmati kecukupan material dan sosial, yang bekerja rata-rata tiga sampai lima jam per hari dan pada waktu luang menikmati seluruh kebutuhan material mereka. Dengan demikian, waktu sibuk buruh industri modern yang menyelesaikan pekerjaannya selama 21 jam sampai 35 jam per minggu lebih banyak dari pada waktu sibuk suku-suku asli tersebut. Waktu senggang yang tersedia bagi mereka dihabiskan untuk bermasyarakat, tidur, dan kegiatan-kegiatan kultural yang mengesankan.

Dalam penilaiannya mengenai masyarakat yang bertahan hidup dengan berburu, mengumpulkan makanan, dan bertani, Sahlins mencapai kesimpulan yang mengejutkan: dibandingkan dengan budaya dunia saat ini, di dalam budaya paleolitik (zaman batu tua) dan neolitik (zaman batu muda) tidak banyak terjadi kelaparan, baik proporsional maupun absolut. Menurut Sahlins, dalam zaman batu tua, jumlah penduduk dunia yang kelaparan ternyata jauh lebih sedikit. Hal ini merupakan yang pertama kali bagi dunia. Kini, pada saat teknologi menjadi sangat berkuasa, kelaparan justru telah melembaga. Bagi Sahlins, tidak hanya kelaparan yang diproduksi secara sosial, tetapi juga terutama kemiskinan. Ironisnya, semua itu diproduksi melalui proses pembangunan ekonomi. Meskipun "orang-orang yang paling primitif hanya memiliki sedikit harta, mereka tidak miskin".⁵² Integrasi negara-negara miskin ke dalam pusaran arus global justru memperlebar jurang pemisah antara negara-negara kaya dan miskin. Bahkan, dari indikasi-indikasi kesejahteraan sosial seperti gizi dan akses ke dokter, sejumlah negara-negara di Afrika menunjukkan penurunan kualitas yang bahkan lebih rendah dibanding saat mereka masih berada dalam penjajahan.⁵³

⁵² Marshall Sahlins, *Stone Age of Economics* (New York: Aldine Publishing Company, 1972), hal. 36

⁵³ Bruce Rich, *Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan dan Krisis Pembangunan*, terj. AS Burhan dan R. Benu Hidayat (Jakarta: INFID, 1999), hal. 333

Jika demikian faktanya, tidakkah terlalu salah dipostulatkan bahwa globalisasi mendorong kekerasan, dalam dimensi dan spektrum maknanya yang luas? Kekerasan bisa tampil dalam banyak wajah; agama, komunal, dan politik. Dengan kerangka seperti ini, maraknya gerakan-gerakan militan fundamentalis yang menebarkan kekerasan di berbagai tempat di dunia dapat dipahami dalam lingkup analisis yang lebih kritis dan empatik. Lahirnya gerakan-gerakan militan dapat dipahami sebagai reaksi atas kegagalan globalisasi dalam menunaikan janji-janji kesejahteraannya. Dalam bahasa Falk, "kita hanya mungkin memahami keberhasilan politik fundamentalis hanya dengan cara mengapresiasi kegagalan politik sekular".⁵⁴ Begitu pula mewabahnya politik identitas. Politik identitas, baik yang berbasis agama atau etnis, menandakan bahwa masyarakat itu tengah diterpa krisis.⁵⁵ Globalisasi adalah salah satu faktor utama pemicu krisis itu. Pesatnya modernisasi dan gencarnya globalisasi melahirkan dislokasi personal dan sosial, frustrasi dan kekosongan makna hidup. Agama dan tribalisme, dalam situasi seperti itu, hadir menawarkan janji-janji pembebasan.

Kesimpulan

Sebagaimana telah ditandaskan, tulisan ini hendak mengajukan hipotesis sentral: klaim-klaim globalisme perihal integrasi manusia dalam rimbun desa buana (*global village*), semakin usangnya negara dan insitusi politik, dan terciptanya *worldview* universal yang menjadi pedoman nilai manusia sejagat sebaiknya dibaca lebih sebagai preskripsi ideologis ketimbang deskripsi empiris. Sebagai ideologi, pengandaian tentang keunggulan pasar dan keniscayaan globalisasi tidak semata bertolak dari telaah analitis dan kalkulasi logis, melainkan telah dipeluk setaraf iman dan kepercayaan. Militansi mereka dalam memegang keyakinan itu tidak kalah kuat dibanding kaum fundamentalis. Bahkan, oleh Richard Falk, di antara jajaran

⁵⁴ Richard Falk, *On Humane Governance op.cit.*, hal. 105

⁵⁵ Samir Amin dalam Samir Amin & Burhan Ghalyoun, *Hiwâr al-Dawlah wa al-Dîn* (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâfi al-Arabi, 1996), hal. 20

kelompok fundamentalis, mereka inilah yang paling kuat dan bertenaga. Di antara para fundamentalis, mereka yang percaya dan berserah diri sepenuhnya kepada kekuatan dinamika pasar tanpa peduli pada dampak kemanusiannya adalah tipe fundamentalis yang paling kukuh.⁵⁶ Pada banyak kasus, preskripsi ideologis ini lebih banyak dipompakan ke negara-negara berkembang dan terbelakang, bukan pada negara maju. Pada negara yang disebut terakhir, globalisasi neoliberal tidak berarti, misalnya, tumbanganya negara-bangsa, tetapi justru lahirnya sintesis unik yang diistilahkan Gamble sebagai: ekonomi bebas dan negara kuat!⁵⁷ dan bukannya ekonomi bebas, negara lemah. Evaluasi yang tajam juga dikemukakan King: "tataran di mana argumen politik dan ekonomi tentang tereduksinya negara dalam praktek berlawanan dengan kebutuhan terhadap adanya negara yang kuat untuk menegaskan kekuatan pasar. Berkaitan dengan ini adalah pengaruh kubu konservatif Kanan Baru yang secara eksplisit menghendaki negara yang kuat. Banyak pengamat menandakan bahwa rezim semisal Pemerintahan Thatcher hanya servis bibir dalam setiap gagasannya tentang ekonomi bebas: sebab dalam kenyataannya, ia bersandar kepada negara yang kuat dan aktif baik dalam wilayah ekonomi maupun non-ekonomi".^{58***}

⁵⁶ Richard Falk, *On Humane Governance, op. cit.*, hal. 112

⁵⁷ Andrew Gamble, *The Free Economy and the Strong State*. Dalam *The Socialist Register* (1979), hh. 1-25.

⁵⁸ Desmond S. King, *The New Right Politics, Market and Citizenship* (London: Macmillan Education, 1987), hal. 21-2

Daftar Pustaka

- Amir, Samir & Burhan Ghalyoun (1996). *Hiwâr al-Dawlah wa al-Dîn*. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâfi al-Arabi.
- Appadurai, Arjun (2000). *Modernity at Large; Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
- Bryan, Lowell dan Farrel, Diana (1996). *Market Unbound: Unleashing Global Capitalism*. New York: Wiley.
- Calhoun, Craig (1993). 'Nationalism and Ethnicity.' *Annual Review of Sociology*, 19 (215-216).
- Deane, Phyllis (1989). *The State and the Economic System: An Introduction to the History of Political Economy*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- Falk, Richard (1995). *On Humane Governance; Toward a New Global Politics*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Falk, Richard (1999). *Predatory Globalization: A Critique*. Cambridge: Polity Press.
- Friedman, Jonathan (1990). 'Being the World: Globalization and Localization. Dalam M. Featherstone [ed.], *Global Culture*. London: Sage.
- Gamble, Andrew (1979) 'The Free Economy and the Strong State.' *The Socialist Register*.
- Giddens, Anthony (1985). *The Nation-State and Violence; Volume Two of Contemporary Critique of Historical Materialism*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony (1999). *Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.
- Gilpin, Robert (2000). *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century*. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
- Held, David (1995). 'Democracy and the New International Order.' Dalam Daniele Archibugi dan David Held [eds.]. *Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order*. Cambridge: Polity Press.
- Hirst, Paul & Thompson, Grahame (1999). *Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance*.

- Cambridge: Polity Press.
- Holton, Robert J. (1998). *Globalization and Nation-State*. London: Macmillan Press.
- King, Desmond S. (1987). *The New Right Politics, Market and Citizenship*. London: Macmillan Education.
- Mas'ood, Mohtar (2002). *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neoliberal*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Nye Jr. , Joseph S. (2002). *The Paradox of American Power; Why the World's Only Super Power Can't Go it Alone*. Oxford: Oxford University Press.
- O'Brien, Richard (1992). *Global Financial Integration: The End of Geography*. London: Chatham House/Pinter.
- Ohmae, Kenichi (1990). *The Borderless World; Power and Strategy in the Interlinked Economy*. London: Harper Business.
- Ohmae, Kenichi (1996). *The End of the Nation-State; The Rise of Regional Economies* Hammersmith, London: HarperCollinsPublisher.
- Oscar Arias, 'The Moral Challenge of Globalization,' *ceramah di York University, Toronto*. Laporannya dapat dibaca dalam *Kompas*, 31 Agustus 2001, hal. 36
- Petras, James Petras dan Veltmeyer, Henry (2001). *Globalization Unmasked; Imperialisme in 21st Century*. London: Fernwood Publishing & Zed Books.
- Polanyi, Karl (2001). *The Great Transformation; The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Rahardjo, M. Dawam (1981). 'Pembangunan dan Kekerasan Struktural: Agenda Riset Perdamaian.' *Prisma*, No. 3.
- Rich, Bruce (1999). *Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan dan Krisis Pembangunan*, terj. AS Burhan dan R. Benu Hidayat. Jakarta: INFID.
- Ricour, Paul (1986). *Lectures on Ideology and Utopia*. (diedit George H. Taylor). New York: Columbia University Press.
- Ritzer, George (1993). *The McDonaldization of Society*. Thousands Oaks, CA: Pine Forge Press.

- Robertson, Roland (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage.
- Robertson, Roland (1995). 'Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity.' Dalam M. Featherstone, S. Lash dan R. Robertson [eds.], *Global Modernities*. London: Sage.
- Sahlins, Marshall (1972). *Stone Age of Economics*. New York: Aldine Publishing Company.
- Smith, Gordon & Naim, Moises (2000). *Altered States: Globalization, Sovereignty, and Governance*. Ottawa, Canada: International Development Research Centre.
- Steger, Manfred B. (2002). *Globalism: The New Market Ideology*. Boston: Rowman & Littlefield.
- Sugiono, Muhadi (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trijono, Lambang (1996). 'Globalisasi Modernitas dan Krisis Negara-Bangsa: Tantangan Integrasi Nasional dalam Konteks Global.' *Analisis CSIS*, XXV, No. 2 (Maret-April).